



<https://diskominfo.pesisirselatankab.go.id>



@PPID KabupatenPesisir Selatan



@diskominfoessel



@Kominfo Pessel



@Kominfo Pesisir Selatan

LKj

LAPORAN KINERJA

2023



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 adalah laporan kinerja tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026. Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dengan 4 Sasaran Strategis dan 10 indikator kinerja utama. Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah diukur dalam Bab III, keberhasilan/kegagalan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan misi yang diembatkan dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2023, sebagai berikut :

MISI 1 :Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.

Pencapaian Kinerja untuk indikator kinerja yang terdapat pada Misi 1 sebesar 96,45%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik**. Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 :
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	A	100%
2	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks SPBE	3,55	4,17	117%
3	Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan	Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,21	4,76	113%
4	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Kategori Keterbukaan Informasi Publik	INFORMATIF (99,92)	INFORMATIF (97,20)	97%
5	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	100	100	100%

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 telah dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan menyajikan hasil pelaksanaan program/kegiatan komunikasi dan informatika pada tahun 2023 dan merupakan tahun pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2021-2026.

Program/kegiatan komunikasi dan informatika yang dilaksanakan selama tahun 2023 adalah upaya peningkatan pendapatan dan terciptanya komunikasi dan informatika secara umum mencapai sasaran, namun demikian berbagai kendala masih menghambat pelaksanaan beberapa program/kegiatan sesuai sasaran yang diinginkan, hal ini kedepan tentu membutuhkan pemikiran lebih lanjut dalam pemecahan, serta melakukan perbaikan dan penajaman Renstra, Program dan Kegiatan pada periode 2021-2026 kedepan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih banyak kekurangannya, namun demikian laporan ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.

Painan, Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh

KEPALA DINAS

Wendi, S.H., M.Hum

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026, menetapkan Visi yang merupakan keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan adalah :

“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, Dan Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Profesional”.

Sedangkan misinya adalah :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggul daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdayasaing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melaksanakan misi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 – 2026 yang tujuannya adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Sasarannya adalah meningkatnya aksesibilitas bagi warga terhadap informasi Pembangunan.

Strategi untuk mewujudkannya yaitu peningkatan aksesibilitas bagi warga terhadap informasi Pembangunan, antara lain :
peningkatan kapasitas aparatur pemerintah sesuai dengan kompetensinya;
peningkatan cakupan wilayah untuk pelayanan informasi Pembangunan;
peningkatan layanan interaksi pengaduan secara On-Line.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pembantuan bidang komunikasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 10 Agustus 2021. Dinas Komunikasi dan Informatika selalu berupaya berbenah diri untuk meningkatkan kinerja baik dalam melaksanakan program/kegiatan maupun bidang administrasi dan keuangan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (Good Governance).

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 - i. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - k. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
 - l. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - m. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 ini adalah sebagai bahan pelaporan tahun dan dari kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan berpedoman pada RPJMD, Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja

tentang Indikator kinerja Utama tahun 2023, program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dengan dukungan pembiayaan bersumber dari Kabupaten Pesisir Selatan, dengan harapan agar dapat mengakselerasi secara optimal segala partisipasi aktif masyarakat pada berbagai aktivitas produktif pada bidang komunikasi dan informatika.

1.3.2 Tujuan

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 ini disusun dengan tujuan :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat tugas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja.

1.4 GAMBARAN ORGANISASI

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu Perangkat Daerah yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Komunikasi dan Informatika; yang tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

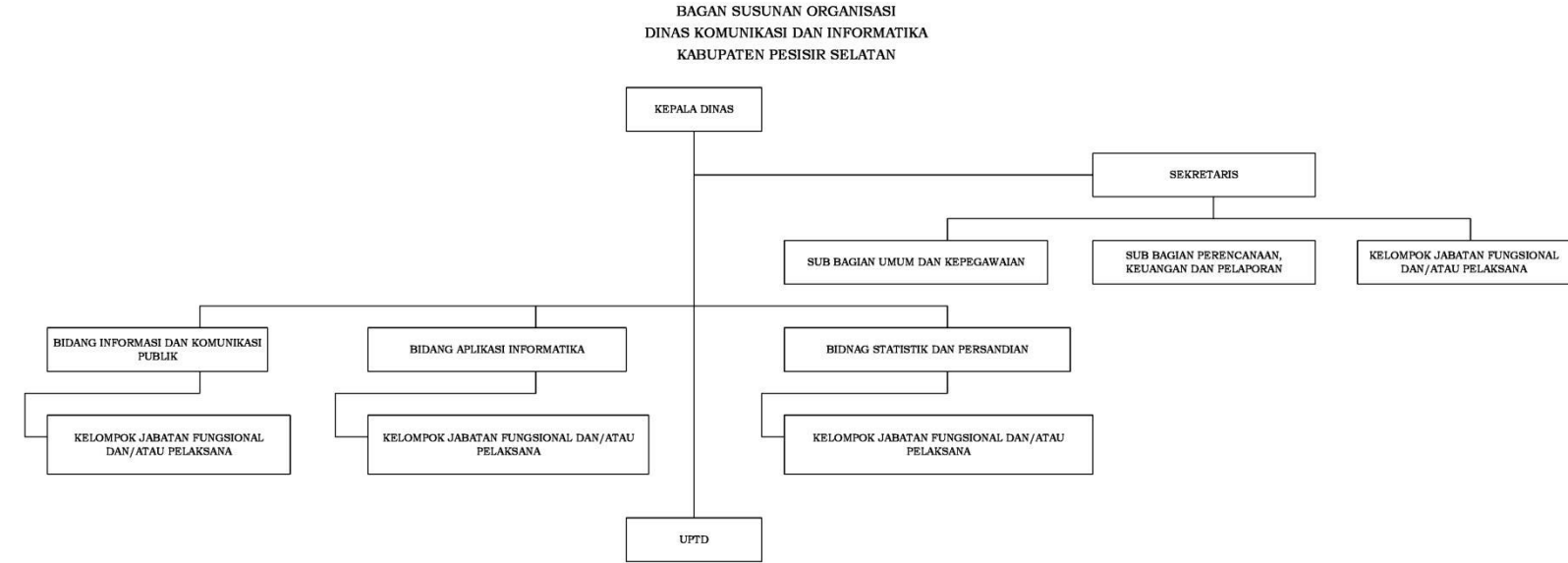
Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 4 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

- Tugas :
Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
- Fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DA INFORMATIKA



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesir Selatan**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika didukung oleh sumber daya manusia dan sarana prasarana sebagai berikut Komposisi Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah.

1.5 SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2023 adalah sebanyak **34** (tiga puluh empat) orang Aparatur Sipil Negara. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan dan Jumlah Pejabat Struktural adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO.	PANGKAT / GOL	JUMLAH
1	PEMBINA UTAMA MADYA / IV c	1
2	PEMBINA TK.I/ IV b	1
3	PEMBINA / IV a	3
4	PENATA TK. I / III d	10
5	PENATA / III c	1
6	PENATA MUDA TK.I / III b	1
7	PENATA MUDA/ III a	10
8	PENGATUR TK. I, II/d	1
9	PENGATUR / II c	6
JUMLAH		34

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pegawai

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S3	-
2	S2	6
3	S1 / D4	18
4	D III	7
5	D II	-
6	SMU/SMA Sederajat	3

7	SMP	-
8	SD	-
JUMLAH		34

Tabel 1.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Struktural

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	DIKLAT PIM II	1
2	DIKLAT PIM III	2
3	ADUM/DIKLAT PIM IV	5
JUMLAH		8

Tabel 1.4.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatannya

NO.	JABATAN	JUMLAH
1	STRUKTURAL	7
2	FUNGSIONAL TERTENTU	22
3	FUNGSIONAL UMUM	5
JUMLAH		34

1.6 SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG

Asset dinas yang merupakan barang tidak bergerak dan bergerak serta barang perlengkapan lainnya, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.5
Aset/Modal Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Asset	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Kendaraan Dinas (Mobil)	3	Buah	
2	Kendaraan Dinas (Motor)	10	Buah	
3	Studio Radio Langkisau	1	Unit	

4	Kamera Foto Biasa	2	Buah
5	Komputer/Destop	14	Buah
6	Laptop	21	Buah
7	Server	8	Unit
8.	GPS	1	Unit
9.	Infocus	2	Unit
10.	CCTV	26	Unit
11.	NVR	4	Unit
12.	Handicam	1	Unit
13.	Kamera Studio	2	Unit
14.	Televisi	7	Buah
15.	Mini PC	3	Unit
16	Printer	15	Unit
17	Router Board	2	Unit
18	Penunjang Server dan Aplikasi	1	Paket
19	Mini Tower	13	Buah
Jumlah		136	

1.7 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memiliki beberapa aspek strategis yang penting untuk diperhatikan dalam menjalankan tugasnya.

Beberapa aspek strategi tersebut antara lain:

1. Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi dan Teknologi Informasi yang inklusif, terjangkau, dan berkualitas untuk memastikan aksesibilitas dan konektivitas yang merata di seluruh wilayah.
2. Pengaturan dan Pengawasan berbagai aspek terkait komunikasi, teknologi informasi, dan media massa untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, perlindungan konsumen, serta keamanan dan integritas data.
3. Mendorong produksi dan distribusi konten digital yang bermutu, informatif, dan edukatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatkan literasi digital masyarakat.
4. Memberdayakan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui program-program pelatihan, sosialisasi, dan

- advokasi untuk meningkatkan partisipasi dalam ekonomi digital dan memperkuat daya saing.
5. Memastikan perlindungan data pribadi dan keamanan siber melalui pengembangan kebijakan, regulasi, dan infrastruktur yang sesuai dengan standar keamanan informasi internasional.
 6. Pengembangan Inovasi Teknologi:
Mendorong inovasi dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta mendukung ekosistem startup dan industri kreatif untuk merangsang pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatkan daya saing nasional.
 7. Kemitraan dan Kolaborasi: Membangun kemitraan dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan program-program di bidang komunikasi dan informatika.
 8. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan program-program di bidang komunikasi dan informatika untuk memastikan pencapaian tujuan dan efisiensi penggunaan sumber daya.
 9. Mengelola dan mengawasi penyiaran serta penyelenggaraan informasi publik untuk memastikan akses informasi yang merata, akurat, dan transparan bagi masyarakat.
 10. Membangun kapasitas dalam penanganan dan darurat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menghadapi dan merespons ancaman keamanan siber serta gangguan teknis lainnya dengan cepat dan efektif.

1.8 PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan yang dihadapi di dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi dan Teknologi Informasi yang inklusif, terjangkau, dan berkualitas untuk memastikan aksesibilitas dan konektivitas yang merata di Kab. Pesisir Selatan

2. Mendorong produksi dan distribusi konten digital yang bermutu, informatif, dan edukatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatkan literasi digital masyarakat.
3. Pemberdayaan Masyarakat Digital dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui program-program pelatihan, sosialisasi, dan advokasi untuk meningkatkan partisipasi dalam ekonomi digital dan memperkuat daya saing.
4. Memastikan perlindungan data pribadi dan keamanan siber melalui pengembangan kebijakan, regulasi, dan infrastruktur yang sesuai dengan standar keamanan informasi internasional.
5. Pengembangan Inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
6. Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan program-program di bidang komunikasi dan informatika untuk memastikan pencapaian tujuan dan efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Penyiaran dan Penyelenggaraan Informasi Publik untuk memastikan akses informasi yang merata, akurat, dan transparan bagi masyarakat.

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategi organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahunan yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada

bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1 Visi

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah **“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan bermartabat didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional”**

2.1.2. Misi

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Misi I sebagai berikut :

Memperkuat tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.

2.1.3 Misi, Tujuan dan Sasaran

Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran yang dilaksanakan pada tahun 2023 ada dua sasaran yang ingin dicapai, sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

2. Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi
3. Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan
4. Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik
5. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah

5.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun yang ditandatangani antara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Bupati Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A
2	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks SPBE	3,55
3	Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan	Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,21
4	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Kategori Keterbukaan Informasi Publik	INFORMATIF (99,92)
5	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	100

Dalam mewujudkan sasaran strategis yang sudah direncanakan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai Program dan Anggaran dari program tersebut pada tahun 2023 yang tertera pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Program dan Anggaran

Program	Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.373.790.825
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 1.082.217.982

Program Aplikasi Informatika	Rp. 2.492.785.045
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 144.166.996
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 68.291.650
Total Anggaran	Rp. 8.161.252.498

5.3 APLIKASI PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA

Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Pesisir Selatan, berbagai aplikasi pendukung dapat digunakan untuk membantu mencapai kinerja yang optimal. Beberapa aplikasi yang digunakan antara lain:

1. Aplikasi Penatausahaan Keuangan SIPDK
2. Aplikasi E-SAKIP untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kominformasi
3. Aplikasi IGA untuk melihat penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan cara-cara inovatif.

5.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Mengukur keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika maka Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun anggaran menurut tujuan dan sasaran yang disajikan dalam table berikut :

Tabel 2.3
 Indikator Kinerja Utama dan target capaian Tahun 2023
 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan

Indikator Kinerja Utama KabupatenPesisir Selatan Tahun 2021-2026									
IndikatorSasaran	Satuan	Target (Rumus)	Target						Penanggungjaw ab
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 1 :Memperkuat tata kelolapemerintahan yang bersih, efektif, demokratif dan transparan									Dinas Komunikasi dan Informatika
1. Nilai AKIP Perangkat Daerah	TanpaSatu an	Hasil EvaluasiLaporan Kinerja Perangkat Daerah/ Inspektorat Daerah	A	A	A	A	A	A	
2. Indeks SPBE	Angka	Hasil evaluasi Kemen PAN RB	3,35	3,40	3,55	3,75	3,95	4,00	
3. IndeksLayanan Pemerintahan BerbasisElektronik	Angka	$Indeks\ Domain_i$$= \frac{1}{BD_i} + \sum_{j=m}^n NA_{ij}$$\times BA_{ij}$ - Indeks Domain adalahnilaiindeks domain ke-<i>i</i>; - BD<i>i</i> adalahnilaiibobot domain ke-<i>i</i>; - NA<i>ij</i>adalahnilaiindeksaspekke-<i>j</i> pada domain ke-<i>i</i>; - BA<i>ij</i>adalahnilaiibobotaspekke-<i>j</i> pada	4,19	4,20	4,21	4,22	4,23	4,25	

		domain ke-I.							
4. KategoriKeterbukaanIn formasi Publik	Angka	Hasil evaluasi dari Komisi Informasi Prov insi Sumatera Barat	Informa tif (93)	Informa tif (93)	Inform atif (99,92)	Informa tif (99,92)	Informati f (99,92)	Inform atif (99,92)	
5. Nilai Kematangan Inovasi In spektorat Daerah	Tanpa Satu an	Hasil Evaluasi Inovasi Perangkat Daerah yang diinput di aplikasi Innovation Government Award	-	100	100	100	100	100	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Metode

pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis.

Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Klasifikasi	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023		
		Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	A	100%
Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks SPBE	3,55	4,17	117%
Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan	Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,21	4,76	113%
Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Kategori Keterbukaan Informasi Publik	INFORMATIF (99,92)	INFORMATIF (97,20)	97%
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	100	100	100%
Rata-rata capaian (%)				105,4 %

3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.3.1 Capaian terhadap Sasaran : Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukurannya di atas dapat diilustrasikan dan disajikan melalui analisis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 5 (lima) sasaran dan lima (lima) indikator yang bisa diuraikan di bawah ini :

Indikator1 :Nilai AKIP Perangkat Daerah

No	Prediket	Nilai Absolut	Interprestasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja di kelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2	A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
3	BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon

			2/unit kerja.
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
6	C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	>0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja		2023		
		Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	A	100%

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberi penilaian, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,

pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporankinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) adalah laporan yang menyajikan simpulan atas implementasi SAKIP dan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti. Nilai AKIP Perangkat Daerah merupakan nilai hasil evaluasi terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Tabel 3.4 Kategori Predikat Nilai Hasil Evaluasi:

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Pelaksanaan evaluasi AKIP adalah evaluator pada Pemerintah Daerah atau tim yang ditunjuk melalui Keputusan Bupati untuk melaksanakan evaluasi AKIP atau Inspektur Daerah jika evaluasi dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah. Tim Evaluator AKIP setidaknya terdiri dari Penanggung Jawab, Supervisor/Pengendali Teknis (Pengawas), Ketua Tim, dan Anggota Tim yang akan membagi tugas melaksanakan evaluasi AKIP dengan mengisi LKE dan Menyusun LHE, serta menyampaikannya kepada pihak yang dievaluasi (Evaluatan) by system atau manual.

Setiap kriteria yang dinilai pada LKE ini membutuhkan pertimbangan keahlian (Professional Judgements) dari evaluator karena terkait dengan penilaian kualitatif. LKE disusun dengan maksud sebagai ketrampilan evaluator dalam melakukan pengumpulan, penilaian, analisis, serta penyimpulan data dan informasi.

Indikator ini memiliki target berupa nilai AKIP bernilai A, diakhiri tahun 2023 Realisasi Kinerja sebesar A atau predikat sehingga capaian untuk indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah sebesar 100 %, ini berarti termasuk dalam kriteria Berhasil.

Hambatan

Pada sasaran Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerjanya, hambatan yang ada adalah belum adanya SOP tentang pengumpulan data kinerja yang *up to date*.

3.3.2 Capaian terhadap Sasaran : Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi

Indikator 1 : Indeks SPBE

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja		2023		
		Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks SPBE	3,55	4,17	117%

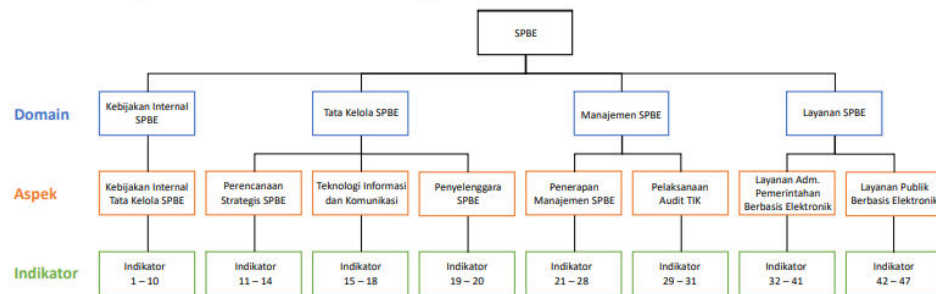
Indeks SPBE merupakan nilai yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Tingkat kematangan yang rendah menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang rendah, sedangkan tingkat kematangan yang tinggi menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang lebih tinggi.

Tabel 3.6
Predikat Nilai SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.



Gambar 2.1 Struktur Penilaian SPBE

Pengukurandarisetiaptingkatkematangandiberinilai sebagaiberikut:

- 1) Tingkat 1 (satu) diberinilai 1 (satu).
- 2) Tingkat 2 (dua) diberinilai 2 (dua).
- 3) Tingkat 3 (tiga) diberinilai 3 (tiga).
- 4) Tingkat 4 (empat) diberinilai 4 (empat).
- 5) Tingkat 5 (lima) diberinilai 5 (lima).

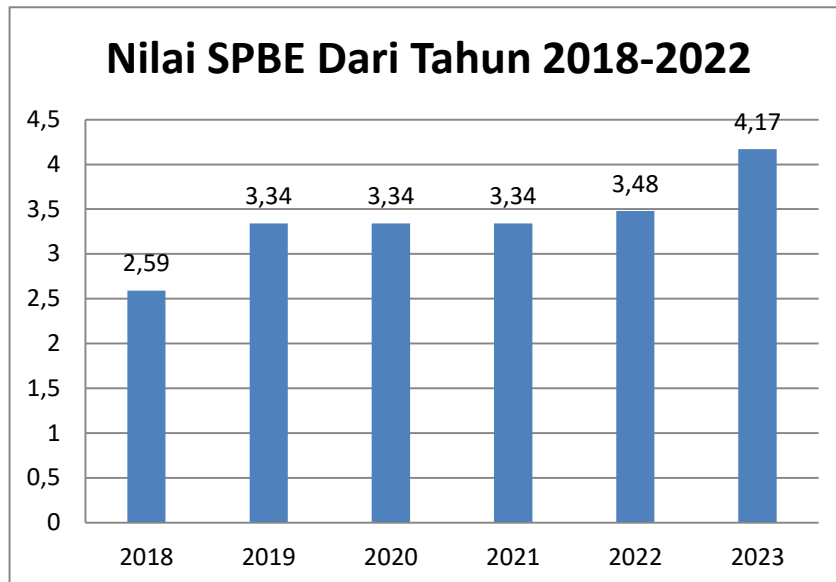
Bobotdiberikan pada domain dan aspekmenuruttingkatkepentingan yang berbeda. Secara total domain layanan SPBE diberikannilaibobot 55%, domain tata kelola SPBE diberinilaibobot 28%, dan domain kebijakan internal SPBE diberinilaibobot 17%. Demikian pula, setiapaspekdarisebuah domain diberikannilaibobot yang berbedaberdasarkantingkatkepentingannya. Bobotsetiap domain dan aspekdapatdilihat pada Tabel 3.6, Sedangkannilaibobotsetiapindikatordapatdihitungdarinilaibobotsebuahaspek dibagi denganjumlahindikator pada aspektersebut.

Berdasarkan Keputusan Menteri PendayaagunaanAparatur Negara dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentanghasilvaluasisistempemerintahanberbasiselektronikpada instansipusat dan pemerintahdaerahtahun 2023, hasilvaluasisistempemerintahanberbasiselektroniktahun 2023PemerintahKabupatenPesisir Selatan dengannilai**4,17**denganprediket**Sangat Baik**.

Indikatorinimemiliki target berupanilaiIndeks SPBE sebesar 3,55, diakhirtahun 2023Realisasi Kinerja sebesar**4,17**ataupredikat SPBE Sangat Baik sehinggacapaianuntukindikatorSistemPemerintahBerbasisElektronik (SPBE) sebesar 117 %, iniberartitermasukdalamkriteriaBerhasil. Program PengelolaanAplikasiInformatikadenganKegiatanPengelolaan e-government di

lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar
Rp.2.492.785.045,- sebagai penunjang pelaksanaan untuk mencapai Nilai SPBE.

Pencapaian Nilai SPBE dari tahun 2018 - 2023



Keterangan :

- Indikator penilaian dari Tahun 2018-2020 sebanyak 35 indikator
- Indikator penilaian dari Tahun 2021-2022 sebanyak 47 indikator

Hasil Indeks SPBE tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB



Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi menjadi salah satu faktor dalam peningkatan nilai SPBE

Tabel 3.7

Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi 2017-2023

NO	Nama Aplikasi	Nama Lengkap	Kegunaan/Fungsi	Programmer	Platform	Metode Akses	Tahun Pembuatan	Tahun Penggunaan	Tahun Pengembangan
1	SIPD	Sistem Informasi Pemerintah daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Penatrusahaan	Pusdatin Kemendagri, Rezki Fernando Putra, S.Kom	Web	Online - Web Browser		2019	
2	GIS Infrastruktur				Desktop		2017		
3	E-PLANNING	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan		Web	Online - Web Browser	2017		
4	E-PAD	Elektronik Pajak Daerah	Pengelolaan Pajak Daerah		Web	Online -	2017		
5	SISMIOP	Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak	Mengintegrasikan seluruh aspek pengelolaan		Desktop		2017		
6	SAPK	Sistem Aplikasi Pelayanan Ke	Digunakan dalam		Web	Online -	2017		
7	SIM GAJI				Desktop	Online -	2017		
8	SIPKD	Sistem Informasi Pengel	Penatausahaan Keuangan		Web	Online -	2017	2017	
9	SIPKD Modul Aset	Sistem Informasi Pengel	Publikasi Menu		Web		2017		
10	E-RTLH						2017		
11	E-PUSKESMAS	Elektronik Puskesmas	Sarana Pengolahan Data Puskesmas		Web		2017		

12	SLRT						2017		
13	SIKS-NG						2017		
14	SIM-PKH						2017		
15	SIMFONI						2017		
16	SIMDAPODIK				Web		2017		
17	SIMTUN				Web		2017		
18	SIMDAK				Web		2017		
19	SIMUN				Web		2017		
20	SIKAK	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Aplikasi Pengelolaan Kependudukan		Web	Online - Lokal	2017		
21	SIM-PKB						2017		
22	SLIMS				Web		2017		
23	SISKEUDES	Sistem Informasi Keuangan Desa			Dekstop	Online - Remote Dekstop	2015	2016	2016-2021
24	CELOK	Cek Lokasi Pessel	Informasi Lokasi Wisata Pesisir	Riki Dwi Putra, M.Kom	Android	Mobile Android	2017	2017	2019
25	TV Pessel	TV Pessel	Media Publikasi Pemda Pesisir Selatan	Riki Dwi Putra, M.Kom	Web	Online	2017	2017	
26	PRODESKEL						2017		

27	PORTALDESA						2017		
28	SIPO				Web		2017		
29	SPIPISE						2017		
30	ANJAB-ABK				Web		2017		
31	JKN				Web		2017		
32	SPSE/SIRUP	SistemInformasiRencanaUmumPengadaan			Web		2017		
33	INAPROC				Web		2017		
34	E-FORMASI				Web		2018		
35	Talent Pool				Web		2018		
36	SIM-RS	SistemInformasiManajemenRumah Sakit		Riki DwiPutra,M.Kom, MasriPrimaDoni,M.Kom	Dekstop	Online-Lokal	2018		
37	E-BOS				Web		2018		
38	AplikasiAntrianPelayanan		SistemLayananAntrianPTSP	MasriPrimaDoni,M.Kom	Dekstop		2018		
39	E-LAPOR	LayananAspirasi danPengaduanOnlineRakyat	Aspirasi danPengaduanOnlineRakyat		Web	Online-WebBrowser	2018		
40	SIMANTRA	SistemInformasiManajemenIntegrasi	LayananPenghubung/Integrasi	DedetMasriyuni,S.Kom	Web	Online-Lokal	2018		

41	DASHBOARD	WebsitePesisir Selatan	PortalPemerintah Daerah	MasriPrimaDoni,M .Kom	Web	Online-Web	2018	2018	2019
42	OSS	OnlineSingleSubmission			Web	Online-WebBrowse r	2018		
43	SIBAPER	SistemInformasiBarangPers ediaan	AdministrasiAset Kantor	MasriPrimaDoni,M .Kom	Web	Online - Web	2018	2018	
44	WebClient Pajak	WebClient E-PAD Pessel	Administrasi PajakDaerah	ZikriNur Mustafa,M.Pd.T	Web	Online - Web	2019		
45	eTPP	AplikasiTambahanPenghasil an	Digunakanuntukentryla poranharian	MasriPrimaDoni,M .Kom	Web-Mobile Android	Online - Web	2019	2021	2021;2022 ;2023
46	SIMPEG	SistemInformasiKepegawaia n	digunakanuntukhal- halterkait	BrahmanaAdi Putra(BKPSDM),M asriPrimaDoni,M.K om,	Web	Online - Web	2019		2022;2023
47	SIPENAMPUN GSINAR	SistemInformasiPenampung an Data	TatakelolaDataKampun gNagari	Riki DwiPutra,M.Kom, RezkiFernandoPut ra,S.Kom	Web	Online - WebBrowser	2019	2019	
48	PPID	PejabatPengelolaInformasi dan Dokumentasi	Informasi Publik	Riki DwiPutra,M.Kom, MasriPrimaDoni,M .Kom,Rama,Rezki	Web	Online - Web	2019	2019	
49	WBS	WhistleBlowingSystem	Pengawasan Internal	SudindriRahmadF ebruanda,S.T	Web	Online - Web	2019		
50	E-SPPD	SistemInformasiPerjalanan Dinas	MonitoringPerjalanan DinasPemda	Kominfo Prov.Sumbar,Masr iPrimaDoni,M.Ko m	Web	Online - Web	2019	2019	2020;2021
51	SIMAYA	SistemAdministrasiPerkanto ran Maya	AdministratsiSurat- menyurat	Kominfo Prov.Sumbar,Masr	Web	Online - Web	2019	2019	2020

				iPrimaDoni,M.Kom					
52	MANDEH	MonitoringAnggaranDesaHebat	Untukmelakukan monitoring	Ramadanillham,S.Kom	Web	Online - Web	2019	2020	202.020.212.022
53	WEBSITEBERITA	WebistePemerintahKabupaten	MediaPublikasiBeritaPemerintah	MasriPrimaDoni,M.Kom	Web	Online - Web	2019	2019	2020;2021
54	SINAR - 182SUBDOMAIN	SistemInformasiNagari	Mempercepatpengelolaan datadesa,mempercepat pelayanan,memanfaatkan datadesa, danmewujudkantransparansipengelolaanpemerintahandes	Riki DwiPutra,M.Kom,MasriPrimaDoni,M.Kom,Ramadanillham,S.Kom,RezkiFernandoPutra,S.Kom	Web	Online - WebBrowser	2019		
55	SiCANTIKCloud	Aplikasi Cerdas LayananPerizinanTerpaduuntukPublik	IndetifikasiLayananPerizinanTerpaduuntukPublik	Kemenkominfo,MasriPrimaDoni,M.Kom	Web	Online - WebBrowser	2019	2019	2020;2021
56	SIMARDI			Rezki FernandoPutra,S.Kom	Dekstop		2019		
57	E-SAKIP	SistemInformasiAkuntabilitasPemerintahan	SistemAkuntabilitasPemerintah	MasriPrimaDoni,M.Kom	Web	Online - Web	2019	2019	2020;2021;2022;2023
58	JDIH	JaringanDokumentasiInformasi Publik	Wadahpendayagunaanbersamaatasdokumen hukumsecaratertib,	Riki DwiPutra,M.Kom,MasriPrimaDoni,M.Kom	Web	Online - WebBrowser	2019	2019	2020
59	SIMBANGDA	SistemInformasiPembangunan Daerah	AdministrasiPembangunan Daerah	SetdaProv.Sumbar,MasriPrimaDoni,	Web	Online - Web	2019	2021	2022

				M.Kom					
60	TALIKASI	PortalLayananInformasi&KomunikasiTerintegrasi	PortalLayananInformasiKomunikasi	MasriPrimaDoni,M.Kom	Web	Online - WebBrowser	2019	2019	
61	WEBSITEOPD	WebistePerangkat Daerah	MediaPublikasiPerangkat Daerah	MasriPrimaDoni,M.Kom	Web	Online - WebBrowser	2018	2018	2020;2021;2022
62	E-KINERJA BKN	SistemInformasiKinerjaASN	EvaluasiKinerjaASN	BKN,MasriPrimaDoni,M.Kom	Web	Online - Web	2020	2021	2022
63	WEBSITELPPLR ADIOLANGKISA U	LembagaPenyiaranPublikLokal	MediaPublikasi Radio LangkisauFM	MasriPrimaDoni,M.Kom	Web	Online - WebBrowser	2018	2018	
64	APLIKASIWEBMAIL OPD	MailPerangkat Daerah	Surat MenyuratPerangkat Daerah	DedetMasriyuni,S.Kom	Web	Online-WebBrowser	2017		
65	APLIKASIWEBMAIL ASN	MailPerangkat Daerah	Surat Menyurat ASNPemda	DedetMasriyuni,S.Kom	web	Online-WebBrowser	2017		
66	APLIKASICLOUD KOMINFO	Storage Dan ShareData			Web	Online-WebBrowser	2018		
67	SIMHP				Web		2021		
68	SIPTL				Web		2021		
69	LAPOR SP4N	SistemPengelolaanPengaduanPelayanan	MonitoringPengelolaan Pengaduan	Kemenpan RB	Web	Online - Web	2021		
70	OPENDATA	Satudatatertbuka	PublikasidataSektoralPemerintah	Riki DwiPutra,M.Kom	Web	Online - Web	2021	2021	2022

71	UKW	Unit Kepatuhan Warga	AplikasiPelaporan Masyarakat	MasriPrimaDoni,M .Kom	Web	Online - Web	2021		
72	IBIPESSEL	IkatanBidan IndonesiaPesisirSelatan	Ujiankompetensibidan dipesisir	Ramadanillham.S, Kom	Web	Online - Web	2021	2021	2022
73	PESSELDALAM	Pesisir Selatan DalamGenggaman	Digunakanuntukmeliha t data	Riki DwiPutra,M.Kom, MasriPrimaDoni,M .Kom,Rezki	Android	Online -	2022	2022	
74	BPHTPPajak	Bea PerolehanHak Atas TanahdanBangunan	PendaftaranHakatastan ahdan	Ramadani Ilham.S.Kom,Masri PrimaDoni.M.Kom	Web	Online - WebBro	2022	2023	2023
75	ABON Pessel	AbsensiOnline	MempermudahPengam bilanAbsensi	MasriPrimaDoni,M .Kom	Android	Online -	2021	2021	2022, 2023
76	APLIKASIFLLA JBERBASIS WEB	Forum Lalu Lintas dan AngkutanJalan	Sebagaiwadahpelapor anmasyarakatterkaitL alu Lintas dan Angkutan	FebyPramadian.S. Kom	Web	Online - WebBrowser	2020		
77	APLIKASIBEASIS WAPESSEL	AplikasiBeasiswaPesisir Selatan	UntukMenjaringSiswa /iberprestasiyangber adadi kabupatenPesisirSela tan	FebyPramadian.S. Kom	Web	Online - WebBrowser	2020		
78	APLIKASIUPK DPMDPPKB	Unit PengelolaKeuangan	Berfungsiuntukme mpermudahPengel olaanKeuanganpad aUnit	FebyPramadian.S. Kom	Web	Online - WebBrowser	2021		
79	SiRomet	AplikasiRoom Meeting	Berfungsiuntukme mpermudahpemak aianruanganperte muan	FebyPramadian.S. Kom	Web	Online - WebBrowser	2022		

80	APLIKASIFLLAJB ERBASIS ANDROID	Forum Lalu Lintas dan AngkutanJalan	MonitoringPenggunaan Lalulintas danpenggunajalan	FebyPramadian.S. Kom	Android	Online - MobileAndroi d	2022	2022	
81	Aplikasi Vaksin	Aplikasi Vaksin	Monitoringpenggunaan Vaksin	FebyPramadian.S. Kom	Web	Online - WebBrowser	2021		
82	AplikasiInforma siDigital	AplikasiInformasiDigital	Sebagaisaranauntukm enampilkaninformasib erupagambar, video,Teks	FebyPramadian.S. Kom	Web- Client	Online	2019		
83	Aplikasie-Monev	EvaluasiMonitoring	DigunakanuntukMonito ringcapaian	Rezki FernandoPutra,S.K om	Web	Online - Web	2018		
84	Siguru	SistemInformasiGuru Kontrak	MonitoringInformasiGu ru Kontrak	Riki DwiPutra,M.Kom	Web	Online - Web	2022	2022	
85	Simapan	SistemInformasiMasyarakat Penerima	Digunakanuntukmelak ukan	Rezki FernandoPutra,S.K om	Web	Online - Web	2021	2022	
86	SPBE	SistemPelayananBerbasisEle ktronik	Digunakanuntukp elaksanaanpenilai nspbesecarainter nal	Rezki FernandoPutra,S.K om	Web	Online - WebBrowser	2021	2021	2022;2023
87	siPENDEKAR	SistemInformasiPemadamKe bakaran	kejadiandi pesisirseltan dan	Ramadanillham,S. Kom	Web	Online - Web	2022	2022	
88	siGAP-DANA	SistemInformasiTanggapBen cana	alam	Ramadanillham,S. Kom	Web	Online - Web	2022	2022	
89	PPDB Online	PenerimaanPesertaDidikBar u	SistemPenerimaanSisw aSMP	Riki DwiPutra,M.Kom	Web	Online - Web	2022	2022	
90	eSURVEY	SurveyStatistikPotensiNagar i	Daerah melaluiSurveyStatistik	Rezki FernandoPutra,S.K om	Web	Online - Web	2022	2022	

91	siMANTAN	SistemInformasiManajemen Pertanahan	ManajemenPertanahan	FebyPramadian.S. Kom	Web	Online - Web	2022	2022	
92	LapauPESEL	AplikasiPemasaranProdukU MKM Pessel	AplikasiPemasaranPro dukUMKM	Rezki FernandoPutra,S.K om	Web	Online - Web	2022	2022	
93	ManriskSPBE	AplikasiManajemenRisiko SPBE	Pengolahan DataOPD UntukSPBE	Ramadanillham.S. Kom	Web	Online - Web Browser	2020	2022	2022;2023
94	SIPPORAPessel	AplikasiInformasiPariwisata	InformasiPariwisata	Riki DwiPutra,M.Kom	Web	Online - Web	2022	2022	
95	Pronasa	Program NagariBersekolah	Untukpendataan monitoring	Riki DwiPutra,M.Kom, Ramadanillham,S. Kom	Web	Online - Web	2022	2022	
96	E-Inflasi	LaporanPengawasanInflasiD aerah	Untuklaporanpengawa sanharga	Riki DwiPutra,M.Kom	WebMobil e	Online - Web	2022	2022	
97	Booking Semangki	Aplikasiticketbooking wisatasemangki	Untukmelakukanpemes anantiket	Riki DwiPutra,M.Kom	WebMobil e	Online - Web	2022	2023	
98	PuskesmasSIMRS	AplikasiManajemenPuskes mas	Untukmanajemenlayan anpuskesmas	Riki DwiPutra,M.Kom	Web	Online - Web	2022	2022	
99	Parenting	PercepatanAksi RecoveryStunting	Untukverifikasidatastu nting	RezkiFernandoPut ra,S.Kom	Web	Online - Web	2023	2023	
100	eTLHP	AplikasiTindakLanjutHasilPe meriksaan	TindakLanjutHasil Pemeriksaan	FebyPramadian.S. Kom	Web	Online - Web	2023	2023	
101	siANJASMARA	AplikasiKerjasamaPerusaha an Pers	KerjasamaMediaMassa	FebyPramadian.S. Kom	Web	Online - Web	2023	2023	
102	eASETBM	AplikasiManajemen Aset daerah	Pengelolaan BarangMilikdaerah	MasriPrimaDoni,M .Kom	Web	Online - Web	2023	2023	
103	SIMPADEH	SistemInformasiManajemen PajakDaerah	Administrasi PajakDaerah	Ramadanillham,S. Kom,MasriPrimaD oni,M.Kom,	Web	Online - Web	2019	2022	2022

10 4	Aplikasi covid19	sisteminformasimonitorings ebaranvirus covid	petainformasisebaran	Riki DwiPutra,M.Kom	web			2019	
---------	------------------	---	----------------------	------------------------	-----	--	--	------	--

Hambatan

Pada sasaran Meningkatkan Kapabilitas Birokrasi hambatan nya adalah Kabupaten Pesisir Selatan belum menggunakan Aplikasi Srikandisehingga nilai Indeks SPBE belum Memuaskan

3.3.3 Capaian Kinerja Sasaran 3 : Meningkatkan Digitalisasi Pemerintahan

Indikator 1: Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Tabel 3.8

Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2023

Indikator Kinerja		2022		
		Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,21	4,76	113%

Tingkat Kematangan Kapabilitas Layanan merupakan pengukuran kemampuan organisasi pada suatu layanan dan akan digunakan untuk mengukur tingkat kematangan layanan SPBE yaitu layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Tingkat kematangan kapabilitas layanan diukur dengan 5 (lima) tingkat yaitu informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi, dan optimum.

Daftar indikator Indikator pada Domain Layanan SPBE

Aspek/ Indikator	Nama Indikator Domain Layanan SPBE
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	
Indikator 32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan
Indikator 33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran
Indikator 34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan
Indikator 35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Indikator 36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian
Indikator 37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis
Indikator 38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Indikator 39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah
Indikator 40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Indikator 41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai

Indikator ini memiliki target berupa Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), diakhiri tahun 2023 Realisasi Kinerja sebesar 4,76 sehingga capaian untuk indikator ini sebesar 113 %, ini berarti termasuk dalam kriteria Berhasil.

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan Kegiatan Pengelolaan e-government di

lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.2.492.785.045,- sebagai penunjang pelaksanaan untuk mencapainya Nilai SPBE

**Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikeluarkan oleh
 Kemenpan RB**

Nama Indeks	Nilai 2023
SPBE	4,17
Domain Kebijakan SPBE	4,40
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	4,40
Domain Tata Kelola SPBE	3,70
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	3,75
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	3,50
<i>Penyelenggara SPBE</i>	4,00
Domain Manajemen SPBE	3,09
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	3,13
<i>Audit TIK</i>	3,00
Domain Layanan SPBE	4,76
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	4,60
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	5,00

Hambatan

Pada sasaran Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi yaitu Tidak ada kelemahan namun tetap perlu dilakukan optimalisasi agar dapat indikator yang belum mencapai level 5 dapat ditingkatkan

3.3.4 Capaian Kinerja Sasaran 4 : Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik

Indikator 1: Kategori Keterbukaan Informasi Publik

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik yang akan melayani tentang kebutuhan informasi oleh masyarakat. Keterbukaan informasi publik menjadi peluang masyarakat untuk meningkatkan peran serta dalam penyelenggaraan negara, mendorong untuk pengolahan pelayanan informasi semakin lebih baik

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran 4 Tahun 2023

Indikator Kinerja		2022		
		Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif (99,92)	Informatif (97,20)	97%

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi dalam penilaiannya menggunakan 4 indikator, yaitu:

1. Mengumumkan Informasi Publik berbobot 25%;
2. Menyediakan Informasi Publik berbobot 20%;
3. Pelayanan Informasi Publik berbobot 25%; dan
4. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik berbobot 30%.

Tabel 3.10
Tabel kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik

NO	KUALIFIKASI	NILAI
1	Informatif	97-100
2	Menuju Informatif	80-96
3	Cukup Informatif	60-79
4	Kurang Informatif	40-59
5	Tidak Informatif	<39

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat Nomor : 02/KEP/KI-PSB/XII/2023 Tentang Penetapan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2023. Hasil perolehan penetapan kualifikasi Pemeringkatan dan Pemberian yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada acara Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 dengan nilai **97,20** dalam kategori **Informatif** dan meraih juara 1 se Propinsi Sumatera Barat.

Dalam pencapaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 menyediakan :

1. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana (OPD dan Kecamatan) dan PPID Nagari serta Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dalam rangka meningkatkan kapasitas sumberdaya pengelola informasi dan dokumentasi publik untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Pesisir Selatan dengan tema **“Optimalisasi Peran dan Fungsi PPID dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Untuk Kabupaten Pesisir Selatan INFORMATIKA Tahun 2023.**
2. Pembinaan dan Monitoring langsung ke PPID Pelaksana dan PPID Nagari guna optimalisasi pengumuman dan penyediaan informasi publik dan memberikan pelayanan informasi publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Pengumpulan dan Penyusunan dokumen daftar informasi publik (DIP) melalui website masing-masing PPID Pelaksana yang terintegrasi dengan PPID Utama melalui halaman website: <https://ppid.pesisirselatankab.go.id/> yang diklasifikasikan dan diverifikasi oleh Tim Verifikator PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan. Total daftar informasi publik Tahun 2023 untuk masing-masing kategori:
 - a. OPD : 4.038 DIP
 - b. Kecamatan : 1.393 DIP
 - c. Nagari : 1.299 DIP

Total 6.730 DIP
4. Monitoring dan Evaluasi (Monev) publikasi Dokumen Daftar Informasi Publik (DIP) dan Berita pada masing-masing website PPID Pelaksana dan Nagari. Dinas Kominfo selaku PPID Utama telah menetapkan Target Minimal Publikasi Dokumen Informasi Publik dan Berita pada Website Perangkat Daerah dan Nagari Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 487/116/Kpts/BPTPS/2023 .
5. Mengikuti Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Sumbar dan Bimbingan Teknis Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) guna peningkatan kapasitas SDM PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik PPID Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dan menyerahkan ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

7. Melaksanakan PPID goes to school sebagai salah satu inovasi dari PPID Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengenalkan PPID dan mengedukasi masyarakat akan pentingnya “Hak Untuk Tahu” bagi generasi muda di Kabupaten Pesisir Selatan khususnya siswa dan siswi di SMAN 3 Painan
8. Pembinaan dan Pendampingan Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan sebagai satu-satunya Nagari perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada Evaluasi dan Apresiasi Desa dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional Tahun 2023. Nagari Bunga Pasang masuk dalam 10 (sepuluh) Desa terbaik dari 116 Desa yang dievaluasi se-Indonesia.
9. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 yang dilaksanakan dari bulan Oktober – Desember 2023. Dalam pelaksanaan Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan memakaikan teknik dan metode yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang terdapat pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Monev KIP Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan 2023, dalam penilaiannya menggunakan 4 indikator, yaitu :
 - a. Pengembangan website
 - b. Pengumuman informasi publik
 - c. Pelayanan informasi publik
 - d. Penyediaan informasi publikSelain 4 (empat) indikator diatas, penilaian juga dilakukan dengan melihat sejauh mana unsur komitmen, kolaborasi dan inovasi dalam implementasi Undang-Undang KIP yang dinilai melalui visitasi/kunjungan lapangan ke Badan Publik. Kabupaten Pesisir Selatan untuk keenam kalinya mendapatkan nilai “Informatif”



**Gambar 2.2 Dokumentasi KabupatenPesisirdari Komisi Informasi
Tahun 2023**

Anugerah Monev Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yang diselenggarakan di The ZHM Premiere Hotel Padang, Tanggal 19 Desember 2022. Adapun prestasi yang dicapai Kabupaten Pesisir Selatan pada Monev Keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut

1. Mawardi Roska, Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menerima penghargaan Achievement Motivation Person (AMP) sebagai salah satu tokoh di Sumatera Barat yang memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik dan mengantarkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Kabupaten Informatif 6 (enam) kali berturut-turut.
2. 5 (lima) Badan Publik di Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh kualifikasi "INFORMATIF" yang merupakan kualifikasi tertinggi pada Monev Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan Komisi Informasi Prov. Sumbar, yaitu : - Kabupaten Pesisir Selatan - Nagari Muara Inderapura - Nagari Tambang Laporan Akhir Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023 | 24 - MAN 2 Pessel - SMAN 3 Painan - Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan
3. Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Informasi Nomor : 02/KEP/KIPSB/XII/2023 tentang Penetapan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2023, dari 9 Kategori yang dimonitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi Publik, 4 kategori Pesisir Selatan mendapatkan terbaik 3 (tiga) besar, yaitu sebagai berikut :
 - Kategori Kabupaten/Kota : Kabupaten Pesisir Selatan (Terbaik 1)
 - Kategori Desa/Nagari : Nagari Muara Inderapura (Terbaik 2) dan Nagari Tambang (Terbaik 3)
 - Kategori SMAN/SMK/MAN : MAN 2 PESSEL (Terbaik 1) dan SMAN 3 Painan (Terbaik 2)
 - Kategori Bawaslu Kab/Kota : Bawaslu Kab. Pesisir Selatan (Terbaik 2)

**Table 3.11 DAFTAR REKAP PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TINGKAT KABUPATEN**

I. KATEGORI : PERANGKAT DAERAH

NO.	NAMA OPD	TOTAL NILAI TAHAP 1 (90%)	VISITASI (10%)	TOTAL NILAI KESELURUHAN	KUALIFIKASI
			TOTAL NILAI VISITASI		

1	2	3	4	5	6
1	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	89.76	9.52	99.28	Informatif
2	DINAS KESEHATAN	89.33	9.48	98.81	Informatif
3	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	87.69	9.42	97.10	Informatif
4	DINAS PERTANIAN	86.89	9.20	96.09	Informatif
5	RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN	85.70	9.22	94.92	Informatif
6	DINAS PMD, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	82.17	9.60	91.76	Informatif

II. KATEGORI : KECAMATAN

NO.	NAMA KECAMATAN	TOTAL NILAI TAHAP 1 (90%)	VISITASI (10%)	TOTAL NILAI KESELURUHAN	KUALIFIKASI
			TOTAL NILAI VISITASI		
1	2	3	4	5	6
1	AIRPURA	83.22	8.81	92.03	Informatif
2	RANAH AMPEK HULU TAPAN	81.98	9.39	91.37	Informatif
3	BASA AMPEK BALAI TAPAN	75.78	8.99	84.77	MenujuInformatif
4	PANCUNG SOAL	75.96	7.32	83.28	MenujuInformatif
5	BATANG KAPAS	63.78	7.71	71.48	CukupInformatif

III. KATEGORI : PEMERINTAHAN NAGARI

NO.	NAMA OPD	TOTAL NILAI TAHAP 1 (90%)	VISITASI (10%)	TOTAL NILAI KESELURUHAN	KUALIFIKASI
			TOTAL NILAI VISITASI		
1	2	3	4	5	6
1	TAMBANG	89.60	9.78	99.38	Informatif
2	MUARA INDERAPURA	89.20	9.70	98.90	Informatif
3	AIR HAJI BARAT	87.84	9.52	97.36	Informatif
4	LUNANG TIGA	80.63	9.69	90.31	Informatif
5	PAINAN SELATAN PAINAN	71.60	9.43	81.03	MenujuInformatif

3.3.5 Capaian Kinerja Sasaran 5 : Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah

Indikator 1 : Nilai Kematangan Inovasi PD

Tabel 3.12

Capaian Kinerja Sasaran 5 Tahun 2023

Indikator Kinerja		2023		
		Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai Kematangan Inovasi PD	100	100	100%

Ada 20 indikator yang harus diisi OPD diantaranya adalah :

- a) Regulasi inovasi daerah*;
- b) Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah*;
- c) Dukungan anggaran;
- d) Bimtek inovasi;
- e) Integrasi program dan kegiatan inovasi dalam RKPD;
- f) Keterlibatan aktor inovasi;
- g) Pelaksanaan inovasi daerah;
- h) Jejaring inovasi;
- i) Sosialisasi inovasi daerah;
- j) Pedoman teknis;
- k) Kemudahan informasi layanan;
- l) Kecepatan penciptaan inovasi*;
- m) Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan;
- n) Penyelesaian layanan pengaduan;
- o) Online sistem;
- p) Replikasi;
- q) Penggunaan IT;
- r) Kemanfaatan inovasi*;
- s) Monitoring dan evaluasi inovasi daerah;
- t) Kualitas inovasi daerah*;

* Indikator wajib diisi

Nilai kematangan adalah tingkat keterisian parameter dan evidensi secara benar dan sesuai.

Indikator ini memiliki target berupa Nilai Kematangan Inovasi PD bernilai 100, diakhiri tahun 2023 Realisasi Kinerja sebesar

97ataupredikatsehinggacapaianuntukindikatorNilai KematanganInovasi PDsebesar 97 %, iniberartitermasukdalamkriteriaBerhasil.Pada indikatoriniKominfomeraihTerbaik I Kategori OPD dalam pelaporan inovasi daerahKabupatenPesisir Selatan Tahun 2023



Hambatan

Hambatan yang dihadapi terhadap pencapaian sasaran Nilai Kematangan Inovasi PD yaitu Inovasi Dinas Kominfo belum direplikasi oleh Kab/Kota lain sehingga data untuk Replikasi masih belum bisa diinput.

3.3.6 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja tahun lalu

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi tahun lalu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Lalu (2021-2022)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian	Naik/Turun
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	-	A	100%	100%
2	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks SPBE	3,34	3,48	4,17	117%	13%
3	Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan	Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,20	4,21	4,76	113%	113%
4	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Kategori Keterbukaan Informasi Publik	INFORMATIF (99,00)	INFORMATIF (97,20)	INFORMATIF (99,92)	INFORMATIF (97,20)	0

5	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	-	-	100	100%	100%
---	--------------------------------------	-----------------------------	---	---	-----	------	------

Dari tabel tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 dengan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah Pada tahun 2022 belum ada target sehingga pada tahun 2023 tidak mengalami kenaikan atau penurunan
- Sasaran 2 dengan indikator Indeks SPBE dari target 2022 sebesar 104% pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi sebesar 117%.
- Sasaran 3 dengan indikator Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada tahun 2022 belum ada target sehingga pada tahun 2023 tidak mengalami kenaikan atau penurunan
- Sasaran 4 dengan indikator Kategori Keterbukaan Informasi Publik dari target 2023 sebesar 97% pada tahun 2023 tidak mengalami kenaikan atau penurunan
- Sasaran 5 dengan indikator Nilai Kematangan Inovasi PDP pada tahun 2022 belum ada target sehingga pada tahun 2023 tidak mengalami kenaikan atau penurunan

Untuk tahun 2023 adalah sasaran dengan 5 indikator sebagai berikut :

- Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan target yang direncanakan 100%.
- Indeks SPBE dengan target yang direncanakan 117%.
- Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan target yang direncanakan 113%.
- Kategori Keterbukaan Informasi Publik dengan target yang direncanakan 97%.
- Nilai Kematangan Inovasi PDP dengan target yang direncanakan 100%.

3.3.7 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target kinerja jangka menengah

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target kinerja jangka menengah dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.14
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target kinerja jangka menengah di Dokumen Renstra

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra	Capaian Tahun 2023	Tingkat Capaian
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	A	100%
2	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks SPBE	3,55	4,17	117%

3	Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan	Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,21	4,76	113%
4	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Kategori Keterbukaan Informasi Publik	INFORMATIF (99,92)	INFORMATIF (97,20)	97%
5	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	100	100	100%

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis adalah Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja, Meningkatkan Kapabilitas Birokrasi, Meningkatkan Digitalisasi Pemerintahan, Meningkatkan Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik, Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah dengan indikator sebagai berikut :

- Nilai AKIP Perangkat Daerah adapun realisasi kinerja tahun 2023 dengan nilai Adengan target di Renstra Asehingga capaian tahun 2023 sebesar 100 %
- Indeks SPBE adapun realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 4,17 dengan target di Renstra sebesar 3,55 sehingga capaian tahun 2023 terhadap target Renstra tercapai sebesar 117 %
- Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adapun realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 4,21 dengan target di Renstra sebesar 4,21 sehingga capaian tahun 2023 terhadap target Renstra tercapai sebesar 113 %
- Kategori Keterbukaan Informasi Publik adapun realisasi kinerja tahun 2023 sebesar INFORMATIF (97,20) dengan target di Renstra sebesar INFORMATIF (99,92) sehingga capaian tahun 2023 terhadap target Renstra tercapai sebesar 97%
- Nilai Kematangan Inovasi PD adapun realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 100% dengan target di Renstra 0 sehingga capaian tahun 2023 terhadap target Renstra tercapai sebesar 100%.

3.3.8 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Nasional	Capaian Kabupaten
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	A

2	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks SPBE	2,79	4,17
3	Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan	Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,45	4,76
4	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Kategori Keterbukaan Informasi Publik	75,40	INFORMATIF (97,20)
5	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	-	100

Capaian Kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dibandingkan dengan capaian kinerja nasional sudah lebih dari capaian kinerja nasional. Sedangkan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah dan Indikator Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah tidak termasuk indikator Tingkat Nasional sehingga tidak ada capaian Tingkat nasional.

3.3.9 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dari hasil capaian kinerja dapat disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan mencapai keberhasilan dimana keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

1. Komitmen pimpinan dan aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2. Perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung.
3. Dukungan anggaran untuk pelaksanaan program pengembangan sistem pelaporan sistem pencapaian kinerja dan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sedangkan faktor eksternal yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

1. Dukungan dan sinkronisasi dengan program-program pimpinan
2. Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak baik sesama OPD, maupun pihak swasta yang terlibat dalam pekerjaan bersama

3. Semakin cerdasnya masyarakat terkait kebutuhan akan informasi (Keberadaan UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara untuk mengakses informasi publik).
4. Semakin berkembangnya TIK yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan penyelenggaraan SPBE.

Faktor yang mendukung perbaikan pencapaian kinerja ke depan antara lain :

1. Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan berkomitmen merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja. Dengan memiliki tim yang terlatih dan berkompeten, Dinas Kominfo dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya.
2. Kepemimpinan yang Visioner dapat memberikan arahan yang jelas dan memotivasi staf untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kepemimpinan yang efektif dapat menciptakan lingkungan kerja yang inspiratif dan mendukung inovasi.
3. Sistem Manajemen yang Efisien termasuk proses kerja yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi kemungkinan kesalahan.
4. Peningkatan Kualitas Layanan Dinas Kominfo terus menerus kepada masyarakat merupakan faktor kunci dalam mencapai pencapaian kinerja yang lebih baik.
5. Kemampuan Adaptasi terhadap Perubahan lingkungan, teknologi, dan kebijakan merupakan faktor penting dalam memastikan kelangsungan dan relevansi Dinas Kominfo dalam menghadapi tantangan yang berkembang.
6. Ketersediaan Sumber Daya Finansial dan Teknologi yang memadai merupakan faktor penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kominfo.
7. Budaya Organisasi yang Terbuka dan Responsif: terhadap perubahan merupakan faktor yang mendukung perbaikan kinerja Dinas Kominfo.

Dengan memperhatikan faktor-faktor internal tersebut, Dinas Kominfo dapat memperbaiki pencapaian kerjanya dan meningkatkan kontribusinya dalam mendukung pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat.

3.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terlihat bahwa dari 5 (Lima) indikator yang ada menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100 % yaitu, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Nilai AKIP Perangkat Daerah, Indeks SPBE, Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kategori Keterbukaan Informasi Publik, dan Nilai Kematangan Inovasi PD telah mencapai kinerja sebanyak **105, %** dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 97.12 % dari total anggaran yang dialokasikan. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.15

Efisien Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	97,43%	2,57%
Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Indeks SPBE	3,55	99,60%	0,4%
Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan	Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,21	99,60%	0,4%
Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Kategori Keterbukaan Informasi Publik	INFORMATIF (99,92)	88,50%	11,5%
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi PD	100	97,43%	2,57%

3.5 Realisasi Keuangan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun anggaran 2023 didukung anggaran sebesar Rp. 8.161.252.498,- yang seluruhnya bersumber

pada APBD, dengan komposisi anggaran untuk Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 3.413.330.498,- yang dipergunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai, dan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.747.922.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Alokasi anggaran dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, dengan rincian per Program sebagai berikut :

Tabel 3.16
Realisasi Anggaran Tahun 2023

NO	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi		
			RealisasiAnggara n (Rp)	Capaian (%)	
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Perangkat Daerah	4.422.760.204	879.140.302	19,88%
2	MeningkatnyaKapabilitasBirokrasi	Indeks SPBE	2.427.386.215	236.647.353	9,75%
3	MeningkatnyaDigitalisasi Pemerintahan	IndeksLayanan PemerintahanBerbasisElektronik (SPBE)	2.427.386.215	236.647.353	9,75%
4	MeningkatnyaKeterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	KategoriKeterbukaanInformasi Publik	1.106.875.127	130.951.544	11,83%
5	MeningkatnyaKualitasInovasi Daerah	Nilai KematanganInovasi PD	4.422.760.204	879.140.302	19,88%

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

a. Capaian Sasaran

Dari laporan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator yang tercantum dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026 khususnya di tahun anggaran 2023 dapat terpenuhi sesuai harapan. Dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan baik sesuai ketentuan. Namun hal tersebut, bila ditinjau dari segi anggaran tidak semua mencapai 100% hal tersebut disebabkan adanya efisiensi anggaran.

b. Capaian Indikator

Capaian terhadap 5 indikator dari 5 sasaran sudah melebihi target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika.

Adapun pencapaian dari Indikator :

- Nilai AKIP Perangkat Daerah adalah nilai 100%
- Indeks SPBE sebesar 117 %
- Indeks Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 113 %
- Kategori Keterbukaan Informasi Publik sebesar 97 %
- Nilai Kematangan Inovasi PD sebesar 100% .

c. Capaian Realisasi Keuangan

Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan didukung anggaran sebesar Rp. 8.161.252.498,- yang seluruhnya bersumber pada APBD, dengan komposisi anggaran untuk Belanja Tidak langsung sebesar 3.413.330.498,- yang dipergunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai, dan Belanja Langsung sebesar Rp. 4.747.922.000. Realisasi anggaran sebesar Rp. 7.907.937.757,- (97%)

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian kinerja di tahun mendatang perlu dibuat rencana tindak lanjut.

Beberapa rencana tindak lanjut untuk mendukung keberhasilan pencapaian Program dan Kegiatan pada tahun 2023 antara lain :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur, tenaga ahli IT dan persandian untuk meningkatkan keamanan informasi pemda;
2. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah terutama terkait dengan penyediaan informasi yang harus dipublikasikan maupun informasi yang diminta oleh masyarakat dari Perangkat Daerah dan informasi yang terkait dengan data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan daerah;
3. Penyediaan sarana dan prasarana khususnya yang mendukung kerjasama stakeholder (Pemerintah/Instansi, Swasta, Masyarakat) dan wartawan agar tercipta sebuah sinergitas yang baik antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan insan Pers;
4. Meningkatkan standar layanan yang baik dan pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan berbasis SPBE.
5. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan BAKTI Kemenkominfo dan provider jaringan dalam hal penyediaan data nagari yang membutuhkan bantuan internet pada nagari masing-masing.
6. Mengoptimalkan Pemenuhan variabel keamanan informasi yaitu meningkatkan kesadaran untuk mengamankan informasi, membuat tata kelola dan regulasi keamanan informasi dan melakukan bimbingan teknis untuk sumber daya pengamanan informasi.

Perbaikan kedepan atas capaian yang didapat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk selanjutnya meliputi :

1. Evaluasi Kebijakan dan Program yang menyeluruh terhadap kebijakan dan program yang telah dilaksanakan untuk mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, dan area perbaikan yang perlu diperhatikan.
2. Penyempurnaan Kebijakan dan Regulasi yang ada sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam hal perlindungan data, keamanan siber, dan pengguna teknologi informasi.
3. Penguatan Infrastruktur dan Layanan Teknologi perbaikan terus-menerus pada infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memastikan ketersediaan layanan yang handal dan cepat
4. Peningkatan Literasi Digital dan Pendidikan di kalangan masyarakat, termasuk melalui program pelatihan dan sosialisasi tentang penggunaan internet yang aman dan bertanggung jawab.

5. Mengembangkan dan memperkenalkan aplikasi inovatif yang mendukung pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan efisiensi operasional, seperti aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) atau Internet of Things (IoT).
6. Memperkuat sistem keamanan siber dan kapasitas dalam penanganan keamanan secara proaktif, termasuk melalui pelatihan keamanan bagi staf dan pihak terkait.
7. Meningkatkan kerja sama dengan pihak eksternal, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil, untuk memperluas jangkauan program dan sumber daya yang tersedia.
8. Penggunaan Data dan Analisis untuk menginformasikan pengambilan keputusan strategis, pemantauan kinerja, dan perencanaan program yang lebih efektif.
9. Melakukan promosi dan sosialisasi secara aktif tentang layanan dan program yang disediakan oleh Dinas Kominfotik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi dalam penggunaannya.
10. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sumber daya untuk memperkuat kepercayaan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2023 ini disusun, selanjutnya diharapkan kritik dan saran bagi perbaikan pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan guna mencapai peningkatan kinerja yang lebih baik pada tahun yang akan datang.

Painan, Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS
Wendi, S.H., M.Hum